

Nomor : B/712/RB.06/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi  
Tahun 2022

6 Desember 2022

**Yth. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat**  
di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Setjen MPR tahun 2022 adalah **75,26** dengan kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
	I. Pemenuhan	20,00	16,74	17,84
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,29	6,05
	III. Reform	30,00	19,32	20,66
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>41,35</b>	<b>44,55</b>

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,45	7,53
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,41	8,76
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,25	8,73
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,07	5,69
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>31,18</b>	<b>30,71</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>72,53</b>	<b>75,26</b>

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Setjen MPR telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit.

- Hasil antara area perubahan pada Setjen MPR, sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	268	300,5	KASN
2.	ASN Profesional	0-100	40,82	52,61	BKN
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,06	2,77	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	23,69	20,30	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,01	3,24	Kementerian PANRB
6.	Kapabilitas APIP	0-5	2	2	BPKP
7.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
8.	Indeks Pengelolaan Aset	0-4	-	3,04	Kementerian Keuangan
9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	0-100	-	93,56	Kementerian Keuangan
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	71,49	76,83	ANRI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian sistem merit, ASN profesional, indeks SPBE dan kualitas pelayanan publik. Namun terdapat penurunan pada kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

- Setjen MPR telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, diantaranya:

- a. Telah berusaha meningkatkan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi bagi seluruh anggota organisasi dan unit kerja dengan melakukan kegiatan bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja dan progres pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - b. Telah berusaha meningkatkan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi pada organisasi dan unit kerja dengan mendorong peningkatan kualitas dan penambahan ukuran pada hasil antara;
  - c. Telah melakukan percepatan tata kelola SPBE yang terlihat dari peningkatan hasil penilaian indeks SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PANRB yaitu 2,77 dengan kategori “baik”.
4. Selain tindak lanjut tersebut, Setjen MPR juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya:
- a. Dalam peningkatan manajemen perubahan telah dilakukan upaya melalui internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak pada seluruh ASN, namun belum dilakukan pengukuran terhadap tingkat pemahamannya;
  - b. *Assessment* telah dilakukan terhadap pegawai di lingkungan Setjen MPR, namun masih belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pegawai. Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian terhadap kapasitas APIP yang belum meningkat, meskipun hasil penilaian terhadap sistem merit kategori baik;
  - c. Setjen MPR telah melakukan pembangunan zona integritas, namun belum terdapat unit kerja yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM.
5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Setjen MPR memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	64,70	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	87,60	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	87,28	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	72,89	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Setjen MPR, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 area pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi/sosialisasikan terhadap seluruh pegawai;
2. Melakukan evaluasi rencana aksi agen perubahan, sehingga proyek perubahan yang dibangun benar-benar bermanfaat. Selanjutnya, perlu didorong mekanisme pemberian penghargaan bagi Agen Perubahan yang telah berhasil membangun atau mencapai target rencana kerjanya;
3. Mengoptimalkan media komunikasi yang ada untuk menyampaikan informasi capaian-capaian yang berkaitan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR;
4. Melakukan revaluasi penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB No. 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
5. Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja.

Demikian laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR. Kami menghargai upaya Saudara dan seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya, kami mengharapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**  
**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.